

## UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN MASYARAKAT MUSLIM PAPUA MELALUI INKLUSI KEUANGAN (STUDI PADA BMT KUM 3 DAN BMT AL-HIJRAH)

Nur Faizah

Institut Agama Islam Negeri Sorong

Email: [nurfaizah261293@gmail.com](mailto:nurfaizah261293@gmail.com)

**Abstract:** *This study aims to determine the implementation of the inclusion program by BMTs in Sorong (BMT Al-Hijrah and BMT KUM 3) to alleviate poverty in the Papuan Muslim community. This study uses descriptive qualitative research methods. The technique for collecting data is the interview, observation, and documentation. The data analysis technique used descriptive analysis with the stages of data reduction, data presentation, and conclusions. The results of this study are BMT KUM 3 and BMT Al-Hijrah have implemented financial inclusion programs to alleviate poverty in the Papuan Muslim community. In addition, the efforts that have been made by the two BMTs are by providing easy access for the poor to reach, besides that the two BMTs provide pick-up services, as well as facilitating the requirements for collection and financing products, and provide fast ones. The obstacles BMT KUM 3 and Al-Hijrah face are, First, internal factors, namely the lack of human resources, and external factors, namely customers do not have collateral. Second, from the perception of the Papuan Muslim community who are not familiar with BMT and feel the need for financial services provided by BMT.*

**Keywords:** *Poverty Alleviation, Financial Inclusion, BMT*

**Abstrak :** *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan program inklusi keuangan yang dilakukan oleh BMT yang ada di sorong (BMT Al-Hijrah dan BMT KUM 3) sebagai upaya pengentasan kemiskinan masyarakat muslim Papua. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif dengan tahap reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah BMT KUM 3 dan BMT Al-Hijrah telah menerapkan program-program inklusi keuangan sebagai upaya pengentasan kemiskinan masyarakat muslim papua. Selain itu upaya yang sudah dilakukan oleh kedua BMT tersebut adalah dengan memberikan akses yang mudah dijangkau oleh masyarakat miskin, selain itu kedua BMT tersebut menyediakan layanan pick up, serta memudahkan persyaratan bagi produk penghimpunan dan pembiayaan, dan pencairan yang cepat. Adapun kendala yang dihadapi oleh BMT KUM 3 dan Al-Hijrah ada pada, Pertama, dari factor internal yaitu kurangnya tenaga sumber daya insani, factor eksternal yaitu nasabah tidak memiliki agunan. Kedua, dari persepsi masyarakat muslim Papua yang belum mengenal BMT dan merasa membutuhkan adanya layanan jasa keuangan yang disediakan oleh BMT.*

**Kata kunci:** *Pengentasan Kemiskinan, Inklusi Keuangan, BMT*

### A. PENDAHULUAN

Perkembangan Lembaga keuangan syariah di Indonesia sangatlah akan tetapi perkembangan tersebut belum dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat, dikarenakan tidak meratanya akses masyarakat terhadap Lembaga Keuangan khususnya Syariah. Padahal, akses terhadap layanan jasa keuangan merupakan bagian yang penting dalam upaya pengentasan kemiskinan, yaitu dengan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan aktivitas perbankan seperti meminjam kredit atau menabung, sehingga mereka dapat memiliki

asset, membuka peluang usaha, serta membantu kegiatan usaha mereka yang akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh <sup>1</sup>bahwa tingkat akses layanan jasa keuangan syariah di Indonesia dari tahun 2015-2018 termasuk kategori rendah. Dari 33 provinsi di Indonesia Provinsi Papua Barat berada di posisi lima terendah. Hal ini dikarenakan terbatasnya, literasi keuangan syariah, akses terhadap tabungan, kredit, dan asuransi, serta masyarakat miskin yang tidak memiliki jaminan yang cukup sebagaimana disyaratkan oleh lembaga keuangan syariah dalam mengakses pinjaman modal usaha.

Dari observasi yang dilakukan terhadap masyarakat muslim papua di Kampung Klalin dan Kampung Maibo Kabupaten Sorong, ditemukan data dilapangan tentang akses layanan keuangan syariah pada masyarakat muslim papua masih tergolong rendah, hal itu disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, *Pertama*, tidak memiliki akses terhadap permodalan, dikarenakan mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi persyaratan administrasi misalnya tidak adanya aset untuk dijaminkan. *Kedua*, tidak memiliki keinginan untuk menggunakan jasa layanan dikarenakan tidak memiliki pengetahuan tentang manfaat dari layanan jasa keuangan syariah. *Ketiga*, pendapatan yang rendah, yang habis hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok (makan, sabun, dan susu) dalam satu hari. *Keempat*, pekerjaan yang tidak pasti/tidak jelas, *Kelima*, tempat tinggal di daerah terpencil (pinggiran). Akibatnya tidak dapat dipungkiri sebagian besar dari mereka tidak memiliki pengetahuan sama sekali tentang lembaga keuangan lebih khusus terhadap lembaga keuangan syariah, dan tidak memiliki rekening bank karena beberapa sebab, antara lain besarnya bunga, dan rumitnya administrasi perbankan.

Sejalan dengan permasalahan diatas, maka menjawabnya adalah dengan menggunakan salah satu kebijakan pemerintah yaitu Inklusi Keuangan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, inklusi keuangan merupakan segala bentuk usaha yang bertujuan untuk meminimalisir serta menghilangkan segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non-harga, terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan sehingga dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama untuk daerah dengan wilayah dan kondisi geografis yang sulit dijangkau atau terakses layanan keuangan formal atau daerah perbatasan. <sup>2</sup>

Inklusi keuangan merupakan salah satu program pemerintah yang dapat mengatasi permasalahan kemiskinan dengan melalui percepatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Elemen penting dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi adalah dengan mengoptimalkan kontribusi sector keuangan dengan membuka akses layanan jasa keuangan secara luas kepada masyarakat dan pelaku usaha kecil. Artinya harus ada upaya untuk mendorong pemanfaatan sector keuangan dalam perekonomian masyarakat. Jadi dapat dikatakan inklusi keuangan sangat berpengaruh bagi beberapa kelompok masyarakat yang kurang beruntung, seperti masyarakat berpenghasilan rendah, pinggiran, minoritas, kaum perempuan, dan kaum muda dalam memperbaiki taraf hidup dengan menikmati pelayanan perbankan sebagai

---

<sup>1</sup>Yolanda Masnita, Hermien Triyowati, and Khomsiyah Khomsiyah, "Pemberdayaan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Peran Inklusi Keuangan," *Juara: Jurnal Wahana Abdimas Sejahtera* (2020).

<sup>2</sup>Booklet Keuangan Inklusif, "Booklet Keuangan Inklusif," *Buku Saku Keuangan Inklusif* (2014).

fasilitas yang mendukung kehidupan mereka sehari-hari. Selain itu program inklusi keuangan juga sejalan dengan ajaran agama Islam dimana Islam melarang harta hanya beredar pada orang kaya saja dan ketimpangan pendapatan antara si kaya dan si miskin serta harta tidak beredar pada orang kaya saja <sup>3</sup>

Salah satu Lembaga Keuangan syariah yang memiliki peran dalam membantu pengembangan ekonomi serta memberikan layanan jasa keuangan bagi kelompok masyarakat miskin adalah Baitul Maal Wa Tamwil (BMT). Baitul Maal Wa Tamwil merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah <sup>4</sup>. BMT muncul dimulai dari adanya kebutuhan masyarakat miskin dan usaha mikro kecil terhadap layanan keuangan yang cenderung tidak diberikan oleh lembaga keuangan komersil formal seperti Bank, Hal ini disebabkan karakteristik kelompok masyarakat miskin cenderung tidak terpelajar, tata kelola usaha yang buruk, tidak memiliki laporan keuangan dan lingkungan bisnis tidak pasti, sehingga membuat kelompok masyarakat ini dinilai memiliki resiko yang tinggi untuk diberikan akses permodalan. Selain itu BMT merupakan sebuah lembaga sosial-ekonomi rakyat, yang tidak hanya menyediakan produk dan layanan keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat kelas bawah, nyaris miskin, miskin sampai yang termiskin tetapi juga memberikan program pemberdayaan untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan ekonomi, sosial, dan spiritual <sup>5</sup>. BMT dinilai cocok dengan karakter masyarakat ekonomi bawah dalam mengatasi permasalahan kemiskinan yang berupaya mewujudkan kemandirian secara ekonomi dan memiliki modal sosial yang tinggi berupa tingkat kepedulian sosial yang tinggi. <sup>6</sup>

Maka berdasarkan pemaparan diatas maka peneliti ingin mengkaji bagaimana penerapan program inklusi keuangan di BMT KUM 3 dan BMT Al-Hijrah, bagaimana Program Inklusi Keuangan yang dilaksanakan oleh BMT KUM 3 dan BMT Al-Hijrah sebagai Upaya Pengentasan kemiskinan Masyarakat Muslim Papua dan kendala apa yang dihadapi oleh BMT dalam menerapkan program Inklusi Keuangan.

Isu tentang inklusi keuangan sampai sekarang masih menjadi topik yang menarik untuk dikaji, dikarenakan program pemerintah tersebut belum bisa mencapai tujuan hal ini dibuktikan dengan beberapa penelitiann yang dilakukan terkait dengan inklusi keuangan diantaranya yaitu; *Indeks Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia Tahun 2015-2018*, oleh Sindi Puspitasari dkk. Penelitian ini mengukur tingkat inklusi keuangan pada sector perbankan syariah yang meliputi BUS, UUS, dan BPRS di Indonesia tahun 2015-2018 dengan menggunakan Indeks Inklusi Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan tingkat inklusi keuangan syariah tahun 2015-2018 mengalami perkembangan fluktuatif dimana rata-rata indeks inklusi keuangan syariah di Indonesia termasuk kategori rendah. Perbedaan dari penelitian ini adalah dari jenis data yang

---

<sup>3</sup>*Ibid.*

<sup>4</sup>Muhamad Mukhsin, Inas Khairunnisa, And Abdul Roni, "Strategi Keberlanjutan Baitul Maal Wa Tamwil di Kota Yogyakarta Dengan Metode Analytical Network Process," *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8, no. 1 (March 2022), hlm. 99.

<sup>5</sup>Direktorat Keuangan Inklusi Dana Sosial Keagamaan dan Keuangan Mikro Syariah, Komite Nasional Keuangan Syariah (Knks) Divisi Keuangan Mikro Syariah, *Rekomendasi Kebijakan Strategi Pengembangan Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia*, Ed. Bagus Aryo, Arief Aditya, And Yodi Izharivan, 1st Ed. (Jakarta: Komite Nasional Keuangan Syariah (Knks), 2019).

<sup>6</sup>Jaka Sriyana and Fitri Raya, "Peran BMT Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Kabupaten Bantul," *Inferensi* 7, no. 1 (2013).

digunakan oleh peneliti yaitu kualitatif<sup>7</sup>

Kemudian penelitian oleh Harianto Wijaya yang berjudul *Fungsi Inklusi Keuangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan Masyarakat; Studi Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Satmakura Halal Cabang Curup, Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu*. Hasil penelitian menunjukkan KJKS Satmakura Halal Cabang Curup belum menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi, karena dana yang dihimpun dikantor cabang disetorkan ke kantor pusat kemudian dana tersebut digunakan untuk keperluan kantor pusat dan kantor cabang lainnya sehingga jika anggota atau calon anggota yang ingin mengajukan pembiayaan dan mengambil dana tabungannya KJKS Satmakura halal cabang Curup tidak bisa memenuhi permintaan tersebut karena tidak tersediannya kas.<sup>8</sup> Kemudian penelitian yang berjudul *Studying Financial Inclusion In North – East India*, oleh Disha Bhanot, Varadraj Bapat and Sasadhar Bera, Tujuan dari makalah ini adalah untuk menemukan faktor-faktor yang menentukan tingkat inklusi keuangan di daerah-daerah yang secara geografis terpencil. Studi ini juga bertujuan untuk memberikan langkah-langkah sugestif bagi bank untuk memanfaatkan pasar yang belum dijelajahi. Temuan penelitian ini- Tingkat inklusi keuangan di timur laut India masih sangat rendah.<sup>9</sup>

Berikutnya penelitian yang berjudul *Mengentaskan Kemiskinan dan Kebodohan Ummat melalui Inklusi Keuangan Syariah*, oleh Edi Susilo, Hasil dari penelitian ini bahwa keberhasilan program keuangan inklusif tidak bisa berdiri sendiri, harus melibatkan *stakeholders*, Sinergitas Antara Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam penyaluran pembiayaan dan penghimpunan dana. Persamaan penelitian ini adalah Program Inklusi Keuangan sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu, pada penelitian yang dilakukan oleh Edi Susilo hanya menjelaskan secara umum bahwa inklusi keuangan dapat mengatasi kemiskinan (belum menunjukkan fakta dilapangan) saja dan tidak menjelaskan bagaimana penerapan program inklusi keuangan serta apa saja kendala yang dihadapi oleh pihak BMT dalam melaksanakan program BMT.<sup>10</sup>

Analisis Efektivitas Inklusi Keuangan di BMT Syariah Riyal, oleh Husnul Khatimah, Hasil dari penelitian ini adalah strategi yang dilakukan oleh pihak BSR dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan dengan bekerja sama dengan berbagai unsur masyarakat seperti ketua RT, RW, Majelis Taklim, Sekolah, DPRD setempat, dan jempot bola. Persamaan dari penelitian ini terletak pada Inklusi Keuangan. Perbedaan dari penelitian ini adalah terletak pada pengukurannya yaitu menggunakan analisis SWOT sedangkan penelitian ini menggunakan 6

<sup>7</sup>Sindi Puspitasari et al., “Indeks Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia Tahun 2015-2018,” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 (2020).

<sup>8</sup>Harianto Wijaya, “(Fungsi Inklusi Keuangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Satmakura Halal Cabang Curup, Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu)” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

<sup>9</sup>Bhanot, Disha Varadraj, and Sasadhar Bera, “Studying Financial Inclusion in North-East India. Emerald Insight: International Journal Bank Marketing.,” *Studying Financial Inclusion in North-East India. Emerald Insight: International Journal Bank Marketing*. 30 (2012), hlm. 465–484.

<sup>10</sup>Edi Susilo, “Mengentaskan Kemiskinan dan Kebodohan Ummat Melalui Inklusi Keuangan Syariah (Sharia Financial Inclusion)1,” *Proceeding Seminar Nasional dan Call For Paper “Membangun Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Agama” Diselenggarakan Oleh Adpisi (Asosiasi Dosen Pendidikan Islam Indonesia) Di Unair, Surabaya 19-20 November 2015*. (November 2015).

pilar strategi nasional inklusi keuangan yaitu 1) edukasi keuangan, 2) fasilitas keuangan publik, 3) pemetaan informasi keuangan, 4) kebijakan atau peraturan pendukung, 5) fasilitas intermediasi dan distribusi, dan 6) perlingungan konsumen. dan Indeks keuangan Inklusi (IKI) yaitu pengukuran keuangan inklusif yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan memakai indeks multidimensional berdasarkan data makroekonomi, yaitu ketersediaan / akses, penggunaan, dan kualitas dari layanan perbankan.<sup>11</sup>

*Pemberdayaan lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan peran inklusi keuangan*, oleh Yolanda Masnita dkk, menurut mereka untuk mempercepat pengembangan inklusi keuangan syariah yaitu dengan selalu meningkatkan kualitas dan kecepatan layanan perbankan syariah, bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah mikro (BMT/KJKS), melalui pembiayaan mikro tanpa agunan, pembiayaan qardhul hasan atau tanggung renteng melalui ketua kelompok atau pembiayaan thaharah untuk masyarakat berpenghasilan rendah<sup>12</sup>

*Inklusi Keuangan dan Penurunan Kemiskinan: Studi Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai*, Penelitian ini sama-sama membahas tentang Inklusi keuangan sebagai strategi penurunan kemiskinan. Perbedaanya pada kajian Bantuan Sosial non tunai. Hasilnya inklusi keuangan pada bantuan sosial non tunai untuk masyarakat miskin tidak berdampak pada penanggulangan Kemiskinan.<sup>13</sup>

*Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Penjanggik*, Hasil Penelitian ini menunjukkan peran BUMDes Desa Penjanggik belum mampu meningkatkan perekonomian masyarakat dikarenakan kurangnya ketersediaan modal, kesadaran masyarakat, dan sumber daya manusia yang kurang. Oleh karena itu peneliti menggunakan BMT sebagai objek penelitian yang merupakan salah satu LKS.<sup>14</sup>

## B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah penelitian *field research*.<sup>15</sup> Selanjutnya metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiologi ekonomi. Penelitian dilakukan di dua BMT yang ada di Sorong yaitu BMT Al-Hijrah Kota Sorong dan BMT KUM 3 di Kabupaten Sorong. Alasan peneliti menjadikan BMT KUM3 dan BMT Al-Hijrah karena kedua BMT memiliki jumlah asset terbesar di Sorong Raya.

**Tabel 1. Aset BMT KUM dan BMT Al-Hijrah**

Asset	BMT KUM 3	BMT Al-Hijrah
Tahun 2020	Rp. 9.066.849.981	Rp. 13.343.086.214

*Sumber: Laporan RAT Tahun buku 2020*

<sup>11</sup>Husnul Khatimah, "Analisis Efektivitas Inklusi Keuangan di BMT Syariah Riyal," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen dan Kewirausahaan "Optimal"* 10, no. 2 (2017).

<sup>12</sup>Masnita, Triyowati, and Khomsiyah, "Pemberdayaan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Peran Inklusi Keuangan."

<sup>13</sup>Habibullah Habibullah, "Inklusi Keuangan Dan Penurunan Kemiskinan: Studi Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai," *Sosio Informa* 5, no. 1 (July 2019).

<sup>14</sup>Agus Salihin, "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Pejanggik," *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 7, no. 1 (2021), hlm. 96.

<sup>15</sup>2012 Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif Bandung. Pt. Remaja Rosdakarya," *Upi Repository* (2015).

Informan dalam penelitian ini adalah Ketua Pengurus dan Manajer BMT KUM 3 dan BMT Al- Hijrah, dan Masyarakat yang menjadi anggota BMT KUM3 dan BMT Al-Hijrah. Pemilihan informan dalam penelitian ini berdasarkan pertimbangan pemahaman informan terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Sumber Data yang digunakan adalah data Primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan Ketua pengurus dan Manajer BMT KUM dan BMT al-Hijrah. Data sekunder dalam penelitian ini berupa Laporan Keuangan BMT KUM dan BMT Al- Hijrah, Brosur, Buku referensi, Jurnal, atau penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi ke lapangan dan wawancara secara semiterstruktur dan mendalam, dengan Ketua Pengawas dan Manajer BMT KUM 3 serta BMT Al-Hijrah. Setelah data diperoleh selanjutnya data tersebut dianalisis dengan beberapa Langkah yaitu, *Pertama*, reduksi data dengan menyimpulkan hal- hal penting dari hasil wawancara yaitu tentang program inklusi keuangan dan program pemberdayaan masyarakat muslim papua yang dilaksanakan oleh BMT. *Kedua*, penyajian data, setelah melakukan reduksi data maka data tersebut disajikan dalam bentuk deskripsi. Dan *Ketiga*, penarikan kesimpulan.<sup>16</sup>

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Penerapan program inklusi keuangan di BMT Se-Sorong Raya.

Untuk mngetahui bagaimana penerapan program inklusi keuangan di BMT Al- Hijrah dan BMT KUM 3 maka peneliti ini menggunakan Strategi Nasional Keuangan Inklusi (SNKI) yang dirancang oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dijabarkan dalam 6 pilar<sup>17</sup>

##### a. Edukasi Keuangan

Komponen strategi yang ada dalam pilar ini antara lain, Pelatihan Ketrampilan mengelola keuangan keluarga, Pertemuan Rutin baik Bisnis maupun Non bisnis, Pengetahuan dan kesadaran tentang berbagi produk dan layanan serta resiko dari produk tersebut, Promosi dan sosialisasi layanan produk dan resiko dari produk tersebut.

**BMT Al- Hijrah** telah memiliki dan melaksanakan program berupa Edukasi Keuangan, diantaranya, agenda pertemuan agenda pertemuan rutin yang sifatnya non bisnis yaitu pengajian bulanan setiap hari sabtu sore, dan melakukan promosi dan sosialisasi layanan produk dan resiko dari produk yang bertujuan memberikan pengetahuan dan kesadaran tentang produk dan layanan keuangan. Selanjutnya ada beberapa komponen yang belum bisa dilaksanakan dikarenakan keterbatasan sumber Daya insani yang dimiliki seperti pembinaan seperti pengelolaan keuangan keluarga dan bisnis belum pernah kami lakukan dikarenakan SDI kami terbatas. (Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hartono Pengurus dari BMT Al-Hijrah)

**BMT KUM 3** juga telah melaksanakan dan memiliki program berupa edukasi

<sup>16</sup>Dede Nurohman, "Pemahaman Pengelola Tentang Mudarabah dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Jawa Timur," *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 8, no. 1 (March 2022), hlm. 59.

<sup>17</sup>Booklet Keuangan Inklusif, "Booklet Keuangan Inklusif."

keuangan, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Wisnu selaku AO beliau mengatakan: BMT KUM 3 sudah melakukan program edukasi keuangan dengan mensosialisasikan produk-produk kami baik itu kelebihan maupun kekurangannya, untuk pelatihan anggota berupa pengelolaan keuangan keluarga dan usaha kami belum pernah melakukan sampai tahun 2020 dikarenakan SDI yang terbatas. Untuk pertemuan rutin kami baik itu mingguan atau bulanan kami belum pernah melaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa kedua BMT tersebut sudah melaksanakan pilar satu dari SNIK (Strategi Nasional Inklusi Keuangan), meskipun ada beberapa komponen yang belum dilaksanakan dikarenakan keterbatasannya SDI yang dimiliki.

#### b. Fasilitas Keuangan Publik

Komponen program yang ada pada pilar ini adalah Subsidi dan bantuan sosial (pemenuhan kebutuhan pokok, talangan hutang, layanan sosial, pembiayaan qardh pembiayaan darurat), Pemberdayaan masyarakat (dukungan motivasi, halaqah beasiswa pendidikan), Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil.

**BMT Al- Hijrah** telah melaksanakan dan memiliki program berupa Subsidi dan bantuan sosial, yaitu Pada tahun 2020 BMT Al-Hijrah memiliki program yaitu memberikan bantuan sosial berupa paket sembako, paket peningkatan imunitas, dan APD sederhana. Dari sisi bisnis BMT telah melakukan restrukturisasi pembiayaan bagi anggota existing tanpa biaya tambahan tentu bagi anggota yang terdampak. BMT juga membantu para anggota dan calon anggota untuk mengakses BPUM dari program pemerintah sebanyak Rp. 2.361.600.000,- untuk 984 orang dimana dana bantuan tersebut sebesar Rp. 2.400.000 per orang untuk bantuan modal usaha. Selain itu kami menyediakan pembiayaan qardh untuk tahun 2020 kami sebesar Rp. 2.500.000 lebih kecil dibandingkan tahun 2019 Rp. 4.522.000.

Untuk program pemberdayaan masyarakat BMT Al-Hijrah selalu memberikan motivasi dan dukungan melalui pengajian rutin dan melalui marketing kami yang langsung bertemu dengan anggota. Untuk beasiswa tahun 2020 belum ada. Program pemberdayaan Usaha Mikro Kecil belum pernah kami lakukan. Berdasarkan hasil wawancara diatas BMT Al Hijrah sudah memberikan fasilitas keuangan public meskipun ada beberapa komponen yang belum optimal dilaksanakan seperti pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil

**BMT KUM** telah melaksanakan dan memiliki program berupa Subsidi dan bantuan sosial, program itu berupa bantuan sembako setiap tahun yang dilakukan setiap menjelang Ramadhan atau Idul Fitri. Sembako kita berikan kepada anggota, calon anggota, serta masyarakat sekitar. Kami juga menyediakan pembiayaan berupa talangan hutang bagi anggota atau karyawan yang mau pindah ke Syariah. Untuk pembiayaan Qardh tahun 2020 kami tidak ada. Untuk program pembiayaan darurat ada dan diambil dari dana ZIS.

Untuk program pemberdayaan masyarakat kami sudah melakukan dengan cara memberikan motivasi langsung kepada anggota melalui marketing kami. Dan kami juga memiliki program memberikan beasiswa kepada siswa yang berprestasi untuk tahun 2020 tidak ada akan tetapi tahun 2018 ada sebanyak 10 anak sebesar Rp. 1000.000,-/ anak untuk siswa SD dan SMP. Selanjutnya untuk program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil kami belum memiliki Program. (wawancara Ida, Manajer)

Jadi BMT KUM 3 dan BMT Al- Hijrah keduanya sudah melaksanakan dan memiliki program berupa memberikan Fasilitas keuangan public, akan tetapi ada beberapa yang belum komponen yang belum dilaksanakan seperti pemberdayaan Usaha Mikro Kecil. Jadi bisa dikatakan kedua BMT ini lebih focus kepada penyaluran pembiayaan kepada anggota bukan pemberdayaan dan kemitraan, hubungan BMT kepada anggotanya lebih sebagai *Money lender* bukan *empowering* (pemberdayaan).

c. Pemetaan Informasi

Komponen program yang ada pada pilar ini adalah: Peningkatan kapasitas (pelatihan ketrampilan penguatan SDM, pelatihan ketrampilan mengelola usaha mikro, dan memasarkan produk bagi anggota), Sistem Jaminan Sederhana, Penyediaan Layanan Kredit yang lebih sederhana dan murah, dan Identifikasi nasabah potensial.

**BMT Al- Hijrah dan BMT KUM 3** telah melaksanakan dan memiliki program peningkatan kapasitas diantaranya, pelatihan ketrampilan penguatan SDM, yaitu kegiatan pelatihan untuk karyawan BMT dilaksanakan oleh pihak luar seperti Puskopsyah dan PINBUK, pihak BMT belum pernah melakukan pelatihan untuk karyawan untuk pelatihan pengelolaan usaha mikro kecil juga belum pernah kami lakukan s/d tahun 2020.

BMT Al Hijrah dan BMT KUM 3 memberikan Sistem Jaminan yang Sederhana, serta Penyediaan Layanan Kredit yang lebih sederhana dan murah seperti memberikan persyaratan khusus bagi anggota yang asli papua dan pembiayaan kelompok binaan berupa pembiayaan yang tidak memakai jaminan. BMT AL-Hijrah dan BMT KUM 3 juga menyediakan layanan kredit yng lebih sederhana dan murah hal dibuktikan dengan persyaratan pembiayaan yang tidak mempersulit anggota. Adapun persyaratan pembiayaan yang ditentukan oleh BMT KUM3 dan BMT Al-Hijrah yaitu:

- 1) Foto Copy pemohon (Suami/Istri)
- 2) Foto Copy Kartu Keluarga
- 3) Foto Copy Akta Nikah/ cerai/ pisah harta (jika ada)
- 4) Foto copy perijinan (jika ada)
- 5) Foto Copy Jaminan tergantung dari nilai pinjaman yang diajukan (tidak ada jaminan berlaku untuk anggota tertentu)
- 6) Memiliki usaha yang jelas/ tidak melanggar syariat Islam (jika ada)
- 7) Profit Margin dab bagi hasil.
- 8) *Pick up service* angsuran dari *marketing* pembiayaannya.

Selain persyaratan pembiayaan yang mudah BMT Al- Hijrah dan BMT KUM 3 juga memberikan kemudahan berupa system jemput bola yang memudahkan anggota dalam bertransaksi sehingga tidak perlu datang ke kantor. BMT KUM 3 dan BMT Al- Hijrah dalam melakukan pencairan dana dilakukan dengan cepat, apabila sudah menjadi anggota lama pencairan dapat dilakukan dengan cepat. Sedangkan untuk anggota baru diperlukan survei mendalam terlebih dahulu, setelah diputuskan akan memberi pembiayaan maka dalam waktu sekitar 3 hari pembiayaan tersebut sudah dapat dicairkan.

BMT KUM 3 dan BMT Al-Hijrah telah memberikan kemudahan dan membantu masyarakat dalam memperoleh layanan keuangan. Tidak berhenti sampai disitu kedua BMT ini juga memberikan kelonggaran berupa penundaan pembayaran angsuran dengan cara



memberitahu petugas marketing dan menjelaskan permasalahan yang sedang dihadapi. Pelunasan angsuran juga dapat dilakukan setiap hari sehingga tidak memberatkan nasabah karena mereka rata-rata menggunakan sistem menabung. Suatu saat ketika mereka membutuhkan maka akan dikurangkan dari tabungan yang mereka punya, sehingga dengan menggunakan sistem menabung anggota akan terasa lebih ringan dilakukan daripada harus mengangsur setiap bulan dalam jumlah yang besar.

d. Kebijakan Peraturan

Komponen strategi program yang ada pada pilar ini adalah Kebijakan mendorong sosialisasi produk jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Menyusun skema produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Mendorong perubahan ketentuan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian secara proporsional, Menyusun peraturan mekanisme penyaluran dana bantuan melalui perbankan, Memperkuat landasan hukum untuk meningkatkan perlindungan konsumen jasa keuangan, Menyusun kajian yang berkaitan dengan keuangan inklusif untuk menentukan arah kebijakan secara berkelanjutan.

BMT Al- Hijrah dan BMT KUM 3 telah menyediakan sebuah produk yang dikhususkan untuk membantu masyarakat miskin. produk-produk yang dikeluarkan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun produk-produk Simpanan yang ada di BMT Al- Hijrah antara Lain: simpanan Mudharabah, simpanan ceria, simpanan Haji, dan simpanan berjangka. Produk – produk simpanan di BMT KUM 3 antara lain: Simpanan mudharabah berjangka, simpanan mudharabah umum, dan Tabungan Qurban.

e. Intermediasi dan saluran distribusi

Komponen program strategi dalam pilar ini adalah Memfasilitasi dengan mempertemukan lembaga keuangan (bank) dengan kelompok masyarakat produktif (layak dan *unbanked*), Menyusun skema produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Peningkatan kerjasama antar lembaga keuangan untuk meningkatkan skala usaha, Eksplorasi berbagai kemungkinan produk, layanan, jasa dan saluran distribusi inovatif dengan tetap memberikan perhatian pada prinsip kehati-hatian.

BMT Al-Hijrah memiliki program berupa menyediakan fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan diantaranya, *Pertama*, menyediakan produk simpanan berupa simpanan ceria untuk siswa dengan persyaratan yang mudah dan sederhana, dengan tujuan memberikan edukasi untuk mendorong budaya menabung sejak dini. *Kedua*, membentuk agen BMT untuk memudahkan anggota dalam melakukan transaksi baik simpanan maupun pembiayaan. *Ketiga*, Layanan keuangan digital, yang merupakan kegiatan layanan jasa system pembayaran dan keuangan dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi, seperti BMT AL-Hijrah Mobile, yang dapat didownload langsung di playstore bagi pengguna android. Fitur layanan berupa cek saldo, Transaksi simpanan, Transfer sesama BMT, Cek saldo dan Transaksi Pembiayaan, Pembelian pulsa PLN dan HP, Pembayaran listrik, kartu halo, BPJS, donasi dan lain-lain. *Keempat*, Kerjasama antar lembaga keuangan untuk meningkatkan skala usaha, seperti kerjasama dengan BAZNAS dan LAZ dalam penyaluran dana ZIS. *Kelima*, BMT membantu anggota mengakses program pemerintah untuk mendapatkan program BPUM (Bantuan Produktif Usaha Mikro) Rp. 2.400.000,-/ orang.

BMT KUM 3 juga telah memiliki program berupa menyediakan fasilitas

intermediasi dan saluran distribusi keuangan diantaranya, *Pertama Kedua*, membentuk agen BMT. *Ketiga*, Layanan keuangan digital, yang merupakan kegiatan layanan jasa system pembayaran dan keuangan dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi, seperti, BMT KUM 3 Mobile dengan fitur layanan yang sama dengan BMT Al-Hijrah, *Keempat*, Kerjasama antar lembaga keuangan seperti kerjasama dengan BAZNAS dan LAZ dalam penyaluran dana ZIS.

f. Perlindungan Konsumen

Komponen program strategi dalam pilar ini adalah, Transparansi produk, Perlakuan yang adil, dan Layanan pengaduan nasabah. BMT Al- Hijrah dan BMT KUM 3 telah memiliki program berupa perlindungan konsumen, meskipun BMT KUM 3 belum menyediakan layanan pengaduan anggota. Menurut bapak Hartono, BMT Al-Hijrah sudah sangat transparan dalam memberikan informasi tentang produk- produk jasa layanan keuangan tidak ada istilah konspirasi ataupun spekulasi dalam mengaplikasikan produk-produk kami. Selain itu juga dalam melayani anggota dan calon tidak membedakan antara yang kaya dan yang miskin kami selalu berusaha memperlakukan anggota kami dengan adil. Selain itu kami juga menyediakan kotak kritik dan saran, dan kita mempersilahkan anggota untuk mengisi setiap bertransaksi. Inilah yang membuat kenyamanan kepada masyarakat dalam melakukan transaksi di BMT kami, dibuktikan dengan meningkatnya simpanan anggota sebesar 2,5 Miliar lebih dibanding dengan tahun 2019.

## **2. Upaya BMT Se-Sorong Raya Dalam Mengentaskan Kemiskinan Masyarakat Muslim Papua Melalui Program Inklusi Keuangan**

Berdasarkan hasil Pra Penelitian yang menjadi kendala usaha bagi masyarakat muslim papua yaitu tidak adanya akses untuk mendapatkan modal usaha. Untuk itu peneliti berharap BMT Al-Hijrah dan BMT KUM 3 dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat muslim papua dalam mengakses atau mendapatkan modal. Selanjutnya setelah peneliti melakukan wawancara dengan kedua BMT tersebut fakta yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan yang peneliti harapkan dimana BMT KUM 3 tidak memiliki anggota dan calon anggota baik anggota simpanan maupun anggota pembiayaan yang merupakan penduduk asli papua baik itu yang muslim maupun non muslim. Sedangkan untuk BMT Al- Hijrah pada tahun 2020 mereka memiliki 18 anggota yang merupakan penduduk asli papua, 18 orang tersebut merupakan anggota pembiayaan, akan tetapi pembiayaan mereka masuk dalam kategori pembiayaan yang macet.

Peneliti menggunakan acuan indikator dalam *Booklet* Keuangan Inklusif tahun 2014, yang diterbitkan DPAU & UMKM serta Bank Indonesia. Acuan inilah yang menjadi bahan untuk mengetahui sejauh mana upaya dilakukan oleh BMT KUM dan BMT Al Hijrah dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat muslim papua melalui program inklusi keuangan. Indikator tersebut terdiri dari 4 dimensi yaitu, akses, penggunaan, kualitas, dan dampak. Dalam hal ini peneliti mengambil enam informan yaitu, dua anggota BMT KUM 3 dan dua anggota dari BMT Al-Hijrah, ditambah dengan dua informan dari pengurus BMT KUM 3 dan BMT Al-Hijrah.

**Tabel 2. Data Informan Penelitian (Anggota dan Pengurus)**

Informan	Nama	Jabatan	Jenis Usaha	Lama Menjadi Anggota
1	Hartono	Pengurus BMT Al-Hijrah	-	
2	Wisnu Putra Raharja	AO BMT KUM 3	-	
3	Lastri	Anggota BMT KUM 3	Nasi Kuning	2 Tahun
4	Isna	Anggota BMT KUM 3	Sembako	2 Tahun
5	Latifah Dian	Anggota BMT Al-Hijrah	Laundry Baju	2 Tahun
6	Tyas	Anggota BMT Al-Hijrah	Sayur- mayur	2,5 Tahun

*Sumber: Wawancara dengan informan, Data telah diolah, 2021*

a. Akses

Diukur dengan beberapa indikator diantaranya, Jumlah anggota dan calon anggota, jumlah anggota dan calon anggota papua muslim, jumlah kantor cabang, jumlah agen BMT, cakupan wilayah, hambatan dan kendala anggota ketika membuka dan menggunakan rekening, mengakses layanan dan jasa keuangan, keterjangkauan fisik serta keterjangkauan harga.

BMT Al- Hijrah pada tahun 2020 memiliki jumlah anggota dan calon anggota sebanyak 1.668 orang, dan 18 orang calon anggota yang asli papua. BMT Al-Hijrah belum memiliki kantor cabang, kantor BMT Al-Hijrah berlokasi di Jl. Jend. Sudirman No. 25. C Remu Selatan, Kota Sorong dengan cakupan wilayah Papua Barat. Menurut informan 5 dan 6 mereka tidak memiliki hambatan dan kendala dalam membuka tabungan atau mengakses permodalan di BMT AL-Hijrah, serta kedua memiliki jawaban sama bahwa lokasi BMT Al-Hijrah sangat strategis dan mudah dijangkau. Terlebih lokasinya berada disekitar pasar Remu yaitu pasar terbesar di kota Sorong.

Keterjangkauan harga, kedua informan merasa kemudahan karena tidak adanya agunan, bagi hasil yang kecil 1-1,7 % dan pencairan yang cepat. Untuk pembayaran angsuran, kedua informan merasakan kemudahan, karena BMT Al-Hijrah menyediakan aplikasi digital yaitu BMT Al-Hijrah mobile yang bisa langsung didownload di Handphone masing-masing anggota. Hal ini diharapkan dapat memudahkan dan menudukung operasional dan pembiayaan anggota. Selain itu mereka juga bisa membayar angsuran di ketua kelompok sebagai penanggung jawab atau dibayar langsung pada petugas marketing.

BMT KUM 3 pada tahun 2020 memiliki jumlah anggota dan calon anggota sebanyak 555 orang, BMT KUM 3 belum memiliki kantor cabang, kantor BMT KUM 3 berlokasi di Jl. Nusa Indah No. 225 Mariyai, Distrik Mariyat Kabupaten Sorong. dengan cakupan wilayah Papua Barat. Menurut informan 3 dan 4 mereka tidak memiliki hambatan dan kendala dalam membuka tabungan atau mengakses permodalan di BMT KUM 3, serta keduanya memiliki

jawaban sama bahwa lokasi KUM 3 sangat strategis dan mudah dijangkau karena lokasinya didepan jalan utama Kabupaten Sorong.

Keterjangkauan harga, kedua informan merasa kemudahan karena tidak adanya agunan dikarenakan system pembiayaan kelompok, bagi hasilnya pun kecil 1-1,7 % dan pencairan yang cepat. Untuk pembayaran angsuran, kedua informan merasakan kemudahan, karena BMT KUM 3 menyediakan aplikasi digital yaitu BMT KUM 3 mobile yang bisa langsung didownload di Handphone masing-masing anggota. Selain itu mereka juga bisa membayar angsuran di ketua kelompok sebagai penanggung jawab atau dibayar langsung pada petugas marketing.

#### b. Penggunaan

Diukur dengan beberapa indikator diantaranya, Jumlah simpanan, jumlah pinjaman, total pembiayaan, rata-rata pembiayaan, frekuensi dan lama penggunaan anggota terhadap jasa dan layanan keuangan.

BMT Al Hijrah, pada tahun 2020 jumlah simpanan anggota sebesar Rp. 13,227,538,327 mengalami peningkatan sebesar 2,5 miliar lebih dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp. 10,672,124,258. Hal ini menunjukkan bahwa produk simpanan BMT Al – Hijrah semakin banyak diminati dan mudah diakses bagi masyarakat. selanjutnya pada tahun 2020 jumlah pembiayaan di BMT Al-Hijrah sebesar Rp. 5,388,005,000 mengalami penurunan sebanyak 55% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp. 12,136,210,000. Hal ini disebabkan karena kebijakan dari pihak pengurus bahwa lima bulan pertama sejak diberlakukannya PSBB, BMT tidak menyalurkan pembiaya, dan kebijakan pemerintah daerah tentang pembatasan aktifitas diluar rumah.

Sejak awal berdirinya BMT Al- Hijrah hingga sekarang jumlah anggota dan calon anggota setiap tahun mengalami peningkatan. Banyak dari anggota BMT yang melakukan pembiayaan berulang kali. Informan 5 dan 6 selama telah menjadi anggota selama 2 tahun dan telah melakukan pembiayaan sebanyak 2 kali.

BMT KUM 3, jumlah simpanan anggota yang dapat dihimpun melalui produk tabungan per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 7,553,134,498 mengalami peningkatan sebesar 21,19% dari tahun 2019 sebesar Rp. 6,232,413,025. Hal ini menunjukkan bahwa produk simpanan BMT KUM 3 semakin banyak diminati dan mudah diakses bagi masyarakat. Selama tahun 2020 jumlah pembiayaan di BMT Al-KUM 3 sebesar Rp. 3,609,510,000 untuk 196 anggota dengan jenis akad murabahah, mengalami penurunan sebanyak 6,6% dari tahun 2019 sebesar Rp.3,865,000,000. BMT KUM 3 setiap tahun mengalami peningkatan anggota dari sejak berdiri sekitar 204 orang hingga sekarang sejumlah 555 orang. Banyak dari anggota BMT yang melakukan pembiayaan berulang kali, misalnya informan 3 dan 4 sudah menjadi anggota selama 2 tahun dan sudah melakukan pembiayaan 2 kali.

#### c. Kualitas

Diukur dengan beberapa indikator yaitu, Pembiayaan mikro, tabungan mikro, transfer mikro, program pembiayaan, program pengembangan, pembayaran tagihan, dan takaful mikro.

#### d. Kesejahteraan

Berdasarkan hasil wawancara dengan keempat informan diatas, indikator

kesejahteraan dapat diketahui dari dampak yang dirasakan oleh anggota dari kedua BMT tersebut. Dampak tersebut terbagi menjadi dua yaitu dampak sosial dan dampak ekonomi. *Pertama*, Dampak sosial diukur dengan beberapa indikator diantaranya, Perubahan pola pikir, Kemandirian, peningkatan kesehatan, peningkatan religiusitas, peningkatan sosial, dan peningkatan pendidikan. *Kedua*, dampak ekonomi diukur dengan beberapa indikator yaitu, Peningkatan Pendapatan, Pengurangan Kemiskinan, Peningkatan usaha, Peningkatan Keahlian, dan Peningkatan Lapangan Kerja.

e. Dampak Sosial dan Ekonomi

Dampak yang dirasakan oleh anggota dengan adanya peran keuangan inklusif melalui program pembiayaan adalah peningkatan pendapatan usaha. Hal ini *dibuktikan* dengan pendapat informan 3 dan 4 yang memiliki usaha nasi kuning dan gorengan mengalami peningkatan pendapatan yang signifikan lebih dari Rp 500.000 per minggu akan tetapi ditahun 2020 terjadi penurunan akibat dampak dari pandemi Covid-19. Peningkatan pendapatan juga dialami oleh informan 5 dengan pendapatan Rp. 600.000 per minggu. Serta informan 6 yang mengalami peningkatan pendapatan Rp. 1.000.000 per minggu dimasa pandemic.

**3. Kendala yang dihadapi oleh BMT dalam menerapkan program Inklusi Keuangan.**

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Kedua BMT memiliki kendala yang sama yaitu, kurangnya tenaga SDM yang ada di BMT, Sumber daya Manusia yang terlibat di BMT KUM dan BMT al-Hijrah hanya berjumlah 4 orang yang terdiri dari *Teller* (1 orang), *Account Officer* (2 orang), *Manajer* (1 orang). Oleh karena itu ada beberapa program inklusi keuangan yang tidak terlaksana contohnya pihak BMT belum bisa memberikan pelatihan atau pembinaan serta penguatan karakter jiwa wirausaha secara periodik kepada masyarakat muslim papua karena hal tersebut membutuhkan tenaga yang extra dan waktu yang lama.

b. Karakter dan Persepsi Masyarakat Terhadap BMT

Masih banyak masyarakat muslim papua yang belum mengenal BMT, dikarenakan kurang adanya sosialisasi dari BMT. Berdasarkan hasil wawancara dengan manajer BMT KUM, mereka belum pernah melaksanakan sosialisasi tentang produk layanan BMT serta belum ada program khusus untuk literasi keuangan kepada masyarakat muslim papua. Selain itu karakter masyarakat muslim papua yang belum bisa merasakan manfaat dan membutuhkan keberadaan BMT, dikarenakan hampir sebagian besar dari masyarakat muslim papua belum ada kemandirian ekonomi.

**D. KESIMPULAN**

BMT KUM 3 dan BMT Al-Hijrah telah menerapkan program-program inklusi keuangan diantaranya, edukasi Keuangan berupa pelatihan ketrampilan mengelola bisnis dan memberikan pengetahuan tentang produk layanan serta resiko dari produk tersebut, Fasilitas Keuangan Publik berupa menyediakan subsidi dan bantuan sosial, Pemetaan Informasi dengan menyediakan layanan pembiayaan yang lebih sederhana dan murah, Kebijakan dengan menyusun skema produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Intermediasi dan saluran distribusi dengan memfasilitasi dengan mempertemukan lembaga keuangan (bank) dengankelompok masyarakat produktif, perlindungan konsumen berupa transparan dalam

menjelaskan produk dan perlakuan yang adil tidak membedakan antar anggota. Kedua BMT sudah berperan dalam memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat mengenai layanan produk keuangan sebagai upaya mengurangi angka kemiskinan. Upaya inklusi keuangan yang dilakukan oleh BMT KUM dan BMT Al Hijrah dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat adalah dengan memberikan akses yang mudah dijangkau oleh masyarakat miskin, selain itu kedua BMT tersebut menyediakan layanan pick up, serta memudahkan persyaratan bagi produk penghimpunan dan pembiayaan, dan pencairan yang cepat. Kendala yang dihadapi oleh BMT KUM 3 dan Al-Hijrah ada pada, *Pertama*, dari faktor internal yaitu kurangnya tenaga sumber daya insani, faktor eksternal yaitu nasabah tidak memiliki agunan. *Kedua*, dari persepsi masyarakat muslim Papua yang belum mengenal BMT dan merasa dibutuhkan adanya layanan jasa keuangan yang disediakan oleh BMT.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

- Bhanot, Disha Varadraj, and Sasadhar Bera. "Studying Financial Inclusion in North-East India. Emerald Insight: International Journal Bank Marketing. ." *Studying financial inclusion in northeast India. Emerald insight: International Journal Bank Marketing*. 30 (2012).
- Booklet Keuangan Inklusif. "Booklet Keuangan Inklusif." *Buku Saku Keuangan Inklusif* (2014).
- Divisi Keuangan Mikro Syariah, Direktorat Keuangan Inklusi Dana Sosial Keagamaan dan Keuangan Mikro Syariah, Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). *Rekomendasi Kebijakan Strategi Pengembangan Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia*. Edited by Bagus Aryo, Arief Aditya, and Yodi Izharivan. 1st ed. Jakarta: Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), 2019.
- Edi Susilo. "Mengentaskan Kemiskinan Dan Kebodohan Ummat Melalui Inklusi Keuangan Syariah (Sharia Financial Inclusion)1." *Proceeding Seminar Nasional dan Call for Paper "Membangun Indonesia Berbasis Nilai-nilai Agama" diselenggarakan oleh ADPISI (Asosiasi Dosen Pendidikan Islam Indonesia) di UNAIR, Surabaya 19-20 November 2015*. (November 2015).
- Habibullah, Habibullah. "Inklusi Keuangan Dan Penurunan Kemiskinan: Studi Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai." *Sosio informa* 5, no. 1 (July 2019).
- Khatimah, Husnul. "Analisis Efektivitas Inklusi Keuangan Di Bmt Syariah Riyal." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Dan Kewirausahaan "Optimal"* 10, no. 2 (2017).
- Masnita, Yolanda, Hermien Triyowati, and Khomsiyah Khomsiyah. "Pemberdayaan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Peran Inklusi Keuangan." *JUARA: Jurnal Wahana Abdimas Sejahtera* (2020).
- Moleong, 2012. "Metodologi Penelitian Kualitatif Bandung. PT. Remaja Rosdakarya." *UPI Repository* (2015).
- Mukhsin, Muhamad, Inas Khairunnisa, and Abdul Roni. "Strategi Keberlanjutan Baitul Maal Wat Tamwil Di Kota Yogyakarta Dengan Metode Analytical Network Process." *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 8, no. 1 (March 2022).
- Nurohman, Dede. "Pemahaman Pengelola Tentang Mudarabah dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Jawa Timur." *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 8, no. 1 (March 2022).
- Puspitasari, Sindi, A. Jajang W, Mahri, and Suci Aprilliani Utami. "Indeks Inklusi Keuangan Syariah Di Indonesia Tahun 2015-2018." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 (2020).

- Salihin, Agus. "Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Pejanggik." *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 7, no. 1 (2021).
- Sriyana, Jaka, and Fitri Raya. "Peran Bmt Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Kabupaten Bantul." *Inferensi* 7, no. 1 (2013).
- Wijaya, Harianto. "(Fungsi Inklusi Keuangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Satmakura Halal Cabang Curup, Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu)." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.